

Artikel: *Akses terbuka/Open access*

**Pencapaian Indikator Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan  
(SDGs) Di Kabupaten Manggarai 2015-2023**

Sitasi: Andriansyah, Daria & Gabur, 2024, JSTAR 4(1), 12-28

Kronologi naskah.

Submit : 21 Mei 2024  
Revisi : 29 Juni 2024  
Diterima : 29 Juni 2024



Penyedia Data Statistik Berkualitas  
untuk Indonesia Maju

**Reformasi Birokrasi**



## PENCAPAIAN INDIKATOR PRIORITAS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (*SDGs*) DI KABUPATEN MANGGARAI 2015-2023

Muhamad Andriansyah<sup>1</sup>, Devi Daria<sup>1</sup>, Maria Septiani Gabur<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT, Indonesia

✉korespondensi author: Muhammad.andriansyah@bps.go.id, devi.daria@bps.go.id, maria.gabur@bps.go.id

### **Abstract**

*The time for completion of the Sustainable Development Goals agreement will soon be nearing its end in 2030. In the remaining time, it is the government's duty to make movements to achieve the predetermined targets. It all starts with data. Good data management will make evaluation and development planning right on target, effective and efficient. Likewise, its application to *SDGs* indicator data is both at the central and regional levels. *SDGs* indicators sourced from National Socio-Economic Survey (*Susenas*) activities are 39 out of 289 indicators in total, of which 17 *Susenas* indicators are priority indicators. This research focuses on the achievements of *SDGs* priority indicators sourced from *Susenas* and indicators analyzed in the *SDGs* Road Map document in Manggarai Regency. The results obtained show that the achievement of indicators in Manggarai Regency is still on the right track, although several indicators require the government to intervene more to resolve them.*

**Keyword:** *National Socio-Economic Survey (Susenas), Priority Indicators, Sustainable Development Goals/SDGs.*

### **1. Pendahuluan**

Dimulai pada tanggal 25 September 2015 bertempat di New York, Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), para pemimpin dunia resmi mengesahkan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (*Sustainable Development Goals/SDGs*) sebagai kesepakatan pembangunan global. Pada pertemuan tersebut, 169 negara bersepakat dan berkomitmen untuk menjalankan serangkaian tujuan, dan cita-cita global dan nasional yang diharapkan tercapai pada tahun 2030 sesuai dengan temanya yaitu: “Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan”. TPB/*SDGs* memiliki prinsip yaitu tidak

meninggalkan satu orangpun (*leave no one behind*), pembangunan menyeluruh (*universal development*), inklusif, dan saling berintegrasi.

TPB/*SDGs* memiliki 169 target, 289 indikator, dan 17 tujuan sebagai bentuk melanjutkan usaha pencapaian dari *Millennium Development Goals (MDGs)* yang telah berakhir pada tahun 2015 lalu. 17 tujuan tersebut yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan yang Berkualitas; (5) Kestaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih juga Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi serta Infrastruktur; (10)

Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan guna Mencapai Tujuan. Hidayat (2022) menjelaskan beberapa pilar dalam TPB/*SDGs* diantaranya:

- a. Pilar Pembangunan Sosial yaitu tercapainya pemenuhan atas hak dasar manusia yang berkualitas dengan adil dan setara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Pilar Pembangunan Lingkungan yaitu tercapainya pengelolaan terhadap sumber daya alam serta lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan.
- c. Pilar Pembangunan Ekonomi yaitu tercapainya pertumbuhan ekonomi yang bertaraf dengan keberlanjutan beberapa inovasi, peluang kerja serta usaha, infrastruktur yang memadai, industri inklusif, dan didukung kemitraan.
- d. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola Pembangunan hukum dan tata kelola TPB/*SDGs* yaitu terbentuknya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif guna terciptanya stabilitas keamanan.

Untuk dapat fokus dalam pencapaian TPB/*SDGs*, maka dilakukan analisis keterkaitan antar indikator dan ditentukan indikator prioritas melalui

langkah-langkah berikut: (1) mengumpulkan data historis indikator TPB/*SDGs* untuk seluruh provinsi di Indonesia; (2) mengukur kinerja indikator TPB/*SDGs* berdasarkan *Revealed Comparative Advantage (RCA)*; menghitung (3) *proximity*, (4) *centrality* dan (5) *density*; dan (6) pemilihan prioritas indikator TPB/*SDGs*. Indikator dengan *centrality* tinggi menunjukkan bahwa mencapai indikator tersebut dapat berdampak positif dan memiliki peluang yang lebih baik untuk mencapai indikator lainnya karena pengaruhnya terhadap kinerja TPB/*SDGs* secara keseluruhan lebih tinggi. Berdasarkan urutan nilai *centrality*, terdapat 27 indikator prioritas yang mencakup empat pilar pembangunan TPB/*SDGs*.

Di Indonesia, TPB/*SDGs* diterapkan mulai dari level nasional yang dikelola oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) hingga level desa yang dikelola oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Menurut Amalia Adininggar Widyasanti (2023), ketersediaan data yang lengkap dan kontinu mutlak diperlukan untuk mendukung keberhasilan pencapaian pelaksanaan TPB/*SDGs* di Indonesia.

Terlebih sekarang ini merupakan era keterbukaan informasi, dimana keberadaan informasi data indikator strategis menjadi sangat penting sebagai bahan evaluasi dan perencanaan

pembangunan. Tata kelola data yang baik menjadi kunci dalam melihat progres perkembangan capaian tujuan organisasi tidak terkecuali dalam agenda TPB/*SDGs*. Tata kelola yang baik atas data (*good governance of data*) dapat membantu organisasi dalam memastikan bahwa penggunaan data di organisasi berdampak positif terhadap kinerja organisasi dan membantu organisasi dalam memastikan kesesuaian dengan kewajiban seperti peraturan, undang-undang, atau kontrak terkait penggunaan dan penanganan data yang dapat diterima (Sukma dkk. 2020).

Dalam tata kelola data pemerintah, BPS diamanahkan sebagai Pembina Data Statistik sesuai yang dijabarkan Peraturan Presiden (perpres) nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Peraturan ini mengatur peran Kementerian/Lembaga Dinas/Instansi (K/L D/I) mulai tingkat pusat hingga tingkat daerah. Ketua Dewan/Koordinator dan Sekretariat Forum Satu Data diserahkan kepada K/L D/I yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat ataupun tingkat daerah. Peran Walidata di tingkat pusat dilaksanakan oleh setiap K/L pada unit kerjanya, sementara di tingkat daerah peran Walidata dilaksanakan oleh D/I daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan data dimana Walidata dibantu oleh Walidata Pendukung yang berkedudukan dalam setiap D/I daerah. Peran lainnya adalah Produsen Data yang dilakukan oleh setiap K/L D/I untuk menghasilkan data sesuai tugas pokok

dan fungsi masing-masing.

Perpres Satu Data sudah mengatur setiap K/L D/I untuk dapat memenuhi kebutuhan data pemerintahan dalam daftar data dan data prioritas, tidak terkecuali dalam hal penyediaan data indikator TPB/*SDGs*. Sebanyak 175 dari 289 indikatornya (60,6%) menjadi tanggung jawab K/L. Sementara BPS sebagai lembaga penyedia statistik dasar menjadi kontributor dalam penyediaan 114 indikator (39,4%), dimana 43 indikator tersebut dihasilkan dari kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), baik yang dihasilkan sendiri atau bersama dengan K/L. Berdasarkan analisis keterkaitan, Bappenas membagi indikator TPB/*SDGs* menjadi indikator prioritas 1 sebanyak 12 indikator dan prioritas 2 sebanyak 15 indikator. Sebanyak 17 dari 27 indikator prioritas tersebut dihasilkan oleh Susenas. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Susenas yang dilakukan BPS berperan sangat penting dalam kinerja pencapaian TPB/*SDGs*.

Susenas merupakan salah satu survei utama yang menghasilkan data yang dibutuhkan pemerintah untuk mengimplementasikan pembangunan nasional agar sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan TPB/*SDGs*. Melalui Susenas, diperoleh potret kemajuan pembangunan masyarakat bidang sosial dan ekonomi.

Metodologi Susenas didesain untuk penyajian estimasi pada level kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Unit observasi Susenas adalah rumah tangga, sedangkan yang menjadi unit analisis adalah rumah tangga dan individu. Jumlah sampel Susenas Maret sebesar 345.000 rumah tangga, sementara jumlah sampel Susenas September adalah 75.000 rumah tangga. Angka estimasi yang dihasilkan Susenas dihitung menggunakan penimbang sampling (*sampling weight*) final yang sudah dilakukan berbagai *adjustment*. Karena Susenas menerapkan *complex sampling design* dengan tahapan yaitu *stratified two stage sampling*, maka penghitungan analisis lebih lanjut dan estimasi *standard error* dapat dilakukan beberapa pendekatan seperti *Taylor Linearization*, *Bootstrap*, *Jackknife Replication Technique*, *Balanced Repeated Replication*, dan lain sebagainya.

Instrumen pada Susenas terdiri dari dua dokumen pendataan yaitu Susenas Modul Kor, dan Susenas Modul Konsumsi dan Pengeluaran. Jenis data yang dikumpulkan dalam Susenas Modul Kor mencakup keterangan demografi, keterangan dokumen kependudukan, keterangan migrasi, pendidikan, keterangan kepemilikan tabungan dan ketenagakerjaan, keterangan teknologi informasi dan komunikasi, keterangan bepergian, keterangan korban kejahatan, keterangan gangguan fungsional, keterangan keluhan kesehatan dan rawat jalan, keterangan rawat inap, merokok, keterangan pemanfaatan jaminan kesehatan, keterangan imunisasi, ASI, dan MP-ASI, keterangan

penolong persalinan, keluarga berencana, akses terhadap makanan, keterangan perumahan, keterangan akses terhadap layanan keuangan, keterangan kepemilikan barang, keterangan sumber penghasilan rumah tangga, serta keterangan perlindungan sosial. Sedangkan jenis data yang dikumpulkan dalam Susenas Modul Konsumsi dan Pengeluaran mencakup keterangan tentang kuantitas dan nilai konsumsi/pengeluaran makanan, minuman, dan rokok seminggu terakhir, keterangan tentang pengeluaran untuk barang-barang bukan makanan selama sebulan dan setahun terakhir, keterangan rekapitulasi pengeluaran, serta keterangan tentang pendapatan, penerimaan, dan pengeluaran bukan konsumsi selama setahun terakhir.

Berdasarkan *Sustainable Development Report 2023 (SDSM)*, Indonesia saat ini berada di peringkat ke-75 dalam hal kinerja pencapaian TPB/*SDGs*, naik signifikan dibandingkan posisi Indonesia empat tahun lalu (peringkat 102). Hal ini tidak terlepas dari peran Bappenas sebagai Koordinator Pelaksana yang telah melakukan berbagai upaya dalam kemajuan TPB/*SDGs* di Indonesia. Salah satunya dengan membuat *Dashboard TPB/SDGs Indonesia* dan mengembangkan *Dashboard Repository Best Practice*. Tentu dengan adanya dua *dashboard* ini, capaian serta penjelasan lainnya dapat dengan mudah diketahui secara *up-to-date*. Selain itu, Bappenas membuat dokumen Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2023-

2030 yang berisikan perjalanan Indonesia dalam menuju tercapainya TPB/*SDGs*. Dimulai dari kesepakatan global yang diterjemahkan menjadi target level nasional, sasaran dan strategi nasional pencapaian sampai dengan tahun 2030, dan acuan dalam penyusunan Rencana Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional dan Daerah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tata kelola data TPB/*SDGs* pada tingkat pusat sudah sangat baik. Namun pada tingkat daerah tata kelola data TPB/*SDGs* masih belum sebaik tingkat pusat, seperti halnya di wilayah Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini disebabkan salah satunya adalah media yang ada di tingkat daerah belum seperti media tingkat pusat untuk mengetahui capaian TPB/*SDGs*.

Tata kelola data harus memenuhi kriteria data yang baik dan berkualitas. Menurut Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah, diperlukan 6 kriteria untuk mendapatkan data statistik yang baik dan berkualitas yaitu: (1) relevan, memenuhi kebutuhan pengguna data; (2) akurat, mampu secara tepat menggambarkan keadaan yang diukur; (3) tepat waktu, baik dalam pelaksanaan lapangan maupun waktu penyajian; (4) mudah diakses, oleh para pengguna data; (5) mudah ditafsirkan, didukung dengan penjelasan, dan dilengkapi dengan metadata; (6) konsisten, dalam konteks antar waktu, dan antar wilayah.

Indikator TPB/*SDGs* yang dikelola tingkat pusat bisa dikatakan memenuhi semua kriteria di atas, terutama pada kriteria mudah diakses yang ditunjukkan dengan 2 *dashboard* TPB/*SDGs* dan kriteria mudah ditafsirkan yang ditunjukkan juga dengan tautan yang sama terdapat penjelasan dan metadata dari setiap indikator. Akan tetapi, pada tingkat daerah seperti wilayah Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT tata kelola indikator TPB/*SDGs* belum sepenuhnya memiliki kriteria data sebaik tingkat pusat.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperoleh rumusan masalah yaitu bagaimana kondisi capaian TPB/*SDGs* di Kabupaten Manggarai? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi capaian TPB/*SDGs* di Kabupaten Manggarai, apakah sudah baik atau ada yang perlu ditingkatkan. Penelitian ini dibatasi pada capaian indikator prioritas TPB/*SDGs* yang bersumber dari data Susenas di wilayah Kabupaten Manggarai dan indikator yang dianalisis pada dokumen Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2023-2030.

## 2. Metodologi

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder hasil dari kegiatan Susenas tahun 2015-2023 di Kabupaten Manggarai. Karena ketersediaan data, jika ditemui data yang belum terdapat pada level regional maka akan digunakan data level nasional, begitupun jika ditemui data yang belum ada pada rentang tahun

2015-2023, maka akan ditampilkan data sesuai tahun yang tersedia. Analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini yang menjelaskan capaian indikator terhadap target TPB/*SDGs* tahun 2030.

### Bahan dan Sumber Data

Data indikator yang dihasilkan dari Susenas tahun 2015-2023 diperoleh dari *website dashboard* TPB/*SDGs* Bappenas dan *website* tabel dinamis serta publikasi terbitan BPS.

### Metode Analisis Data

Menurut Hardani dkk. (2020), pendekatan deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Pendekatan deskriptif berfokus pada analisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Pada penelitian ini, pendekatan deskriptif akan digunakan dan alat analisis statistik yaitu gambaran capaian minimum dan maksimum dari indikator prioritas TPB/*SDGs* yang bersumber dari Susenas pada tahun 2015-2023 di wilayah Kabupaten Manggarai.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Menurut Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2023-2030, 17 indikator prioritas yang bersumber dari Susenas dilakukan analisis mengenai capaiannya sebanyak 11 indikator. Tabel 1 di bawah ini dimuat

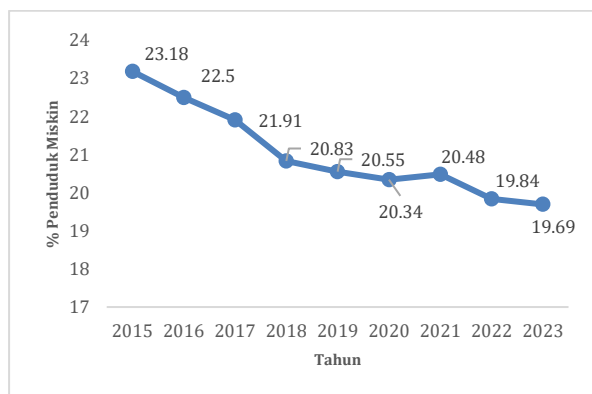
11 indikator prioritas tersebut mulai dari urutan indikator, besaran target hingga *ranking* indikator prioritas dan juga ditambahkan 4 indikator lainnya bersumber dari Susenas yang dianalisis pada Peta Jalan TPB/*SDGs*.

Tabel 1. Indikator Prioritas pada Peta Jalan TPB/*SDGs* 2023 - 2030 yang Bersumber dari Susenas, BPS

Urutan Indikator	Besaran Target dengan Adanya Intervensi	Satuan Target	Level Ketersediaan Data	Ranking Indikator Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.2.1	3.83	Persen	Manggarai	Bukan Indikator Prioritas
2.1.2	3.3	Persen	Indonesia	25
3.1.2.(a)	100	Persen	Manggarai	7
3.1.2.(b)	100	Persen	Manggarai	1
4.1.2.(a)	99.2	Persen	NTT	26
4.1.2.(b)	96.68	Persen	NTT	14
5.3.1.(a)	0.44	Persen	Indonesia	Bukan Indikator Prioritas
5.3.1.(b)	5.93	Persen	NTT	Bukan Indikator Prioritas
6.1.1	100	Persen	Manggarai	4
6.2.1.(b)	100	Persen	Manggarai	5
10.1.1	0.363	Tanpa Satuan	Manggarai	Bukan Indikator Prioritas
11.1.1.(a)	90.6	Persen	NTT	17
16.9.1	100	Persen	Manggarai	18
16.9.1.(a)	100	Persen	NTT	2
16.9.1.(b)	100	Persen	Manggarai	3

Sumber : Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2023 – 2030.

Indikator 1.2.1 Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Nasional, meskipun bukan sebagai indikator prioritas namun Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan adalah penting untuk dicapai dan merupakan sasaran pembangunan di Indonesia. Garis Kemiskinan Maret 2023 tercatat sebesar Rp550.458,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp408.522,- (74,21%), dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp141.936,- (25,79%). Persentase penduduk miskin di Kabupaten Manggarai tahun 2023 sebesar 19,69% dan menunjukkan tren penurunan yang positif sejak tahun 2015, akan tetapi cukup jauh dari target sebesar 3,83% di tahun 2030. Untuk itu, intervensi dari pemangku kebijakan sangat diperlukan dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Manggarai.



Gambar 1. Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Nasional di Kabupaten Manggarai Tahun 2015-2023

Indikator 2.1.2 Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang/Berat Berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (*Food*

*Insecurity Experiences Scale*) merupakan indikator prioritas pada Tujuan 2 TPB/*SDGs* Tanpa Kelaparan. Indikator ini lahir dari penguatan statistik dasar dengan menambah delapan pertanyaan terkait pengalaman kerawanan pangan pada dokumen pendataan Susenas Modul Kor sejak tahun 2017. Melihat pencapaian indikator ini pada tabel 2 di bawah yang menunjukkan tren positif, Indonesia mengalami persentase tertinggi pada tahun 2017 sebesar 8,66%, dan terus menurun hingga pernah mencapai persentase terendah di tahun 2021 sebesar 4,79%. Dengan demikian, Indonesia dapat optimis bisa mencapai target sebesar 3,3% di tahun 2030.

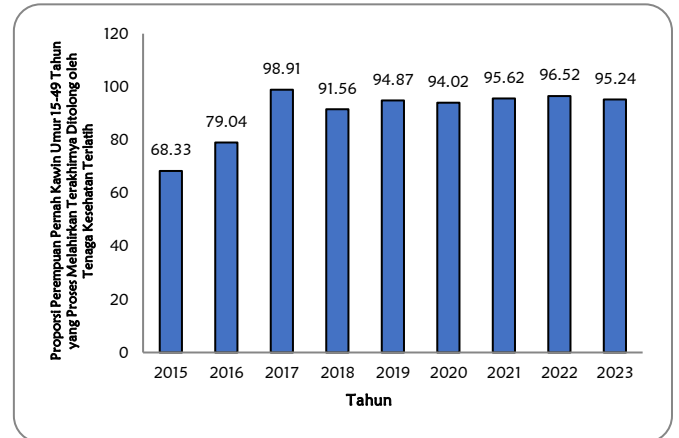
Tabel 2. Indikator 2.1.2 Indonesia Tahun 2017-2022

Tahun	Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang/Berat Berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan ( <i>Food Insecurity Experiences Scale</i> ) (%)
(1)	(2)
2017	8,66
2018	6,86
2019	5,42
2020	5,12
2021	4,79
2022	4,85

Sumber: Susenas, BPS

Indikator 3.1.2.(a) Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga

Kesehatan Terlatih merupakan indikator prioritas ke-7 yang penting dalam Tujuan 3 TPB/*SDGs* Kehidupan Sehat dan Sejahtera. Berdasarkan penjelasan pada *website* UNICEF, proporsi persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terampil atau terlatih (umumnya dokter, perawat, atau bidan namun dapat merujuk pada tenaga kesehatan lain yang memberikan pelayanan persalinan) adalah proporsi persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan terampil atau terlatih. Menurut definisi saat ini, mereka adalah tenaga kesehatan ibu dan bayi baru lahir yang kompeten, terdidik, terlatih dan diatur sesuai standar nasional dan internasional. Mereka kompeten untuk: (i) menyediakan dan memajukan perawatan yang berbasis bukti, berbasis hak asasi manusia, berkualitas, sensitif secara *socio-cultural* dan bermartabat bagi perempuan dan bayi baru lahir; (ii) memfasilitasi proses fisiologis selama persalinan untuk memastikan pengalaman melahirkan yang bersih dan positif; dan (iii) mengidentifikasi dan menangani atau merujuk perempuan dan/atau bayi baru lahir yang mengalami komplikasi. Gambar 2 dibawah ini menunjukkan pada tahun 2023, Kabupaten Manggarai sudah mencapai target yang ingin dicapai sebesar 95,24% Perempuan melahirkan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.



Gambar 2. Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Kabupaten Manggarai Tahun 2015-2023

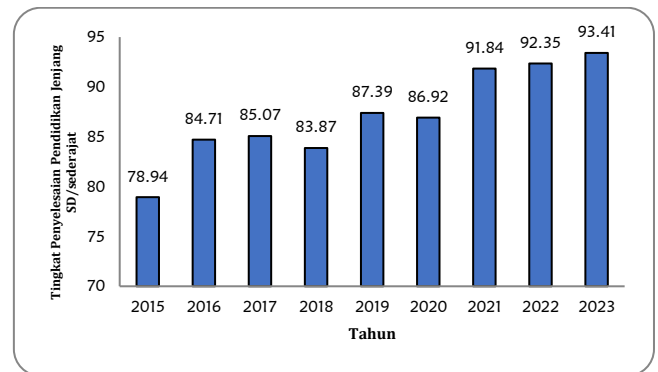
Indikator 3.1.2.(b) Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan merupakan indikator prioritas pertama pada analisis indikator TPB/*SDGs*. Fasilitas Kesehatan adalah elemen penting dalam mencapai tujuan TPB/*SDGs* ke-3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera, karena tidak hanya sebagai tempat pengobatan ketika sakit, tetapi juga bisa sebagai tempat untuk mensosialisasikan mengenai kehidupan sehat dan sejahtera kepada masyarakat. Oleh karena itu sangat diprioritaskan persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan yang pastinya terdapat peralatan yang memadai dan tenaga ahli yang kompeten. Kondisi Kabupaten Manggarai di indikator ini pernah tertinggi di tahun 2021 sebesar 96,18% dan terendah di tahun 2016 sebesar 68,54%. Tahun 2023 mencapai 95,47% sedikit lagi akan mencapai target sebesar 100%.

Tabel 3. Indikator 3.1.2.(b) Kabupaten Manggarai Tahun 2015-2023

Tahun	Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan
(1)	(2)
2015	81,79
2016	68,30
2017	80,61
2018	86,58
2019	91,61
2020	88,29
2021	92,85
2022	93,79
2023	95,47

Sumber: Susenas, BPS

Indikator 4.1.2.(a) Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD/Sederajat merupakan indikator prioritas di Tujuan 4 TPB/*SDGs* Pendidikan Berkualitas. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dirasa masih penting hingga saat ini karena merupakan upaya Pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan taraf kehidupan rakyat. Tren perkembangan tingkat penyelesaian jenjang SD/ sederajat di Provinsi NTT menunjukkan peningkatan positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 di Provinsi NTT adalah capaian tertinggi sebesar 93,41% yang harus ditingkatkan untuk bisa mencapai target 99,2% di tahun 2030.



Gambar 3. Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD/ sederajat di Provinsi NTT Tahun 2015-2023

Indikator 4.1.2.(b) Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP/ Sederajat juga merupakan indikator prioritas di Tujuan 4 TPB/*SDGs*. Memiliki target sebesar 96,68% di tahun 2030, kondisi Provinsi NTT masih terbilang cukup jauh yaitu sebesar 82,48% pada tahun 2023, meskipun menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Oleh karena itu pengambil kebijakan harus lebih serius intervensi pada pendidikan jenjang SMP/ sederajat di Provinsi NTT.

Tabel 4. Indikator 4.1.2.(b) Provinsi NTT Tahun 2015-2023

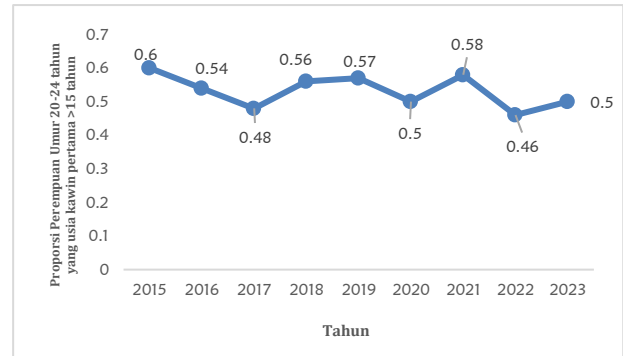
Tahun	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP/ sederajat (%)
(1)	(2)
2015	66,62
2016	70,73
2017	70,54
2018	71,42
2019	74,31
2020	78,81

Tahun	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP/ sederajat (%)
(1)	(2)
2021	78,83
2022	83,25
2023	82,48

Sumber: Susenas, BPS

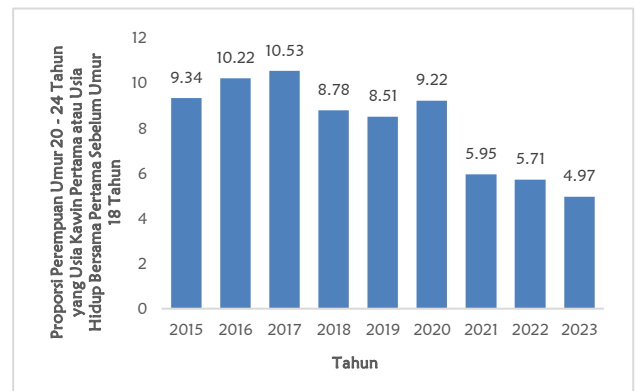
Indikator 5.3.1.(a) Proporsi Perempuan Umur 20 - 24 Tahun yang Usia Kawin Pertama atau Usia Hidup Bersama Pertama Sebelum Umur 15 Tahun bukanlah indikator prioritas dalam TPB/*SDGs*. Meskipun demikian, indikator ini dianalisis dalam Peta Jalan TPB/*SDGs* di Tujuan 5 TPB/*SDGs* Kesetaraan Gender. Kondisi Indonesia sejak tahun 2015 sampai tahun 2023 mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Tertinggi dicapai pada tahun 2021 sebesar 0,58% dan terendah pada tahun 2022 sebesar 0,46%. Meskipun pernah melebihi target sebesar 0,44%, namun pada tahun 2023 capaiannya sebesar 0,50% dan artinya Indonesia mengalami penurunan dan target belum terpenuhi. Penting Pemerintah untuk bisa merumuskan kebijakan mengenai usia perkawinan remaja kepada masyarakat, seperti sosialisasi dan penyuluhan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan remaja.

Indikator 5.3.1.(b) Proporsi Perempuan Umur 20 - 24 Tahun yang Usia Kawin Pertama atau Usia Hidup Bersama Pertama Sebelum Umur 18 Tahun juga bukan merupakan indikator prioritas, namun dianalisis pada dokumen Peta Jalan TPB/*SDGs*.



Gambar 4. Proporsi Perempuan Umur 20 - 24 Tahun yang Usia Kawin Pertama atau Usia Hidup Bersama Pertama Sebelum Umur 15 Tahun di Indonesia Tahun 2015-2023

Di Provinsi NTT pada tahun 2023 mengalami capaian yang baik yaitu diperoleh persentase terendah sebesar 4,97%, sehingga capaian ini sudah memenuhi target sebesar 5,93%. Meskipun demikian, tetap harus dipertahankan bahkan ditingkatkan karena merumuskan kebijakan mengenai dampak usia perkawinan remaja sangatlah penting dan usia remaja haruslah bisa produktif dalam mengenyam pendidikan dan keterampilan.



Gambar 5. Proporsi Perempuan Umur 20 - 24 Tahun yang Usia Kawin Pertama atau Usia Hidup Bersama Pertama Sebelum Umur 18 Tahun di Provinsi NTT Tahun 2015-2023

Indikator 6.1.1 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola Secara Aman (Air Minum Layak) (*Ladder 4*) merupakan indikator prioritas pada Tujuan 6 TPB/*SDGs* Air Bersih dan Sanitasi Layak. Berdasarkan angka yang dihasilkan pada tabel 5, menunjukkan pada 3 tahun terakhir menunjukkan peningkatan dan di atas 90% untuk indikator ini di Kabupaten Manggarai. Oleh karena itu capaian indikator ini harus terus ditingkatkan untuk mencapai target 100% air minum layak di tahun 2030.

Tabel 5. Indikator 6.1.1 Kabupaten Manggarai Tahun 2015-2023

Tahun	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman (Air Minum Layak) ( <i>Ladder 4</i> ). (%)
(1)	(2)
2015	61,05
2016	69,52
2017	68,35
2018	79,63
2019	75,75
2020	74,77
2021	91,68
2022	96,68
2023	95,91

Sumber: Susenas, BPS

Indikator 6.2.1.(b) Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak merupakan indikator prioritas lain yang dianalisis pada Tujuan 6 TPB/*SDGs*. Berdasarkan tabel 6, Kabupaten Manggarai pernah

mengalami keadaan akses sanitasi layak terendah pada tahun 2018 sebesar 19,64% rumah tangga. Di tahun setelahnya, Kabupaten Manggarai berhasil mengatasi capaian akses sanitasi layak dengan tertinggi diperoleh pada tahun 2021 sebesar 72,84% rumah tangga. Dengan target indikator ini sebesar 100% di tahun 2030, maka intervensi harus terus dilakukan.

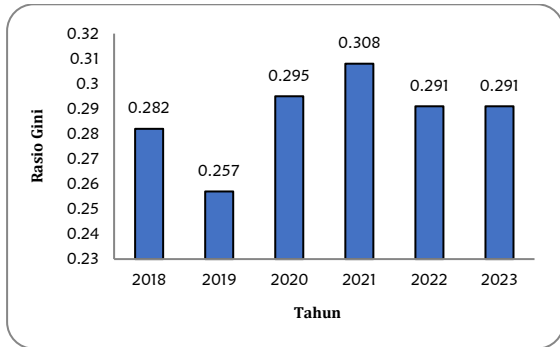
Tabel 6. Indikator 6.2.1 Kabupaten Manggarai Tahun 2018-2023

Tahun	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak (%)
(1)	(2)
2018	19,64
2019	56,14
2020	61,53
2021	72,84
2022	62,1
2023	62,76

Sumber: Susenas, BPS

Indikator 10.1.1 Rasio Gini, meskipun bukan merupakan indikator prioritas, namun indikator ini dianalisis dalam Peta Jalan TPB/*SDGs* di Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan. Rasio Gini terendah Kabupaten Manggarai dialami pada tahun 2019 sebesar 0,257 dan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 0,308. Tahun 2023 Rasio Gini Kabupaten Manggarai sebesar 0,291, menunjukkan masih adanya ketimpangan pendapatan yang cukup belum merata. Semakin mendekati indeks 1 maka pemerataan pendapatan sempurna, namun semakin mendekati indeks 0 maka pemerataan

pendapatan yang sangat jauh. Dibandingkan target TPB/*SDGs* sebesar 0,363 di tahun 2030 maka intervensi kebijakan perlu dilakukan.



Gambar 6. Rasio Gini Kabupaten Manggarai Tahun 2018-2023

Indikator 11.1.1.(a) Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau merupakan indikator prioritas pada Tujuan 11 TPB/*SDGs*, Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan. Berdasarkan publikasi Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2021, indikator rumah layak huni berguna untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat dengan indikasi terpenuhinya kebutuhan dasar perumahan dengan komponen pembentuk indikatornya adalah luas lantai perkapita, air minum layak, sanitasi layak, jenis atap terluas, jenis dinding terluas, dan sumber penerangan listrik. Provinsi NTT mengalami persentase terendah pada tahun 2019 sebesar 32,08%, dan tertinggi pada tahun 2018 sebesar 72,06%. Namun melihat kondisi tahun 2023 sebesar 42,7%, maka Pemerintah Provinsi NTT

harus lebih intervensi pada akses hunian layak dan terjangkau untuk mencapai target 90,57%.

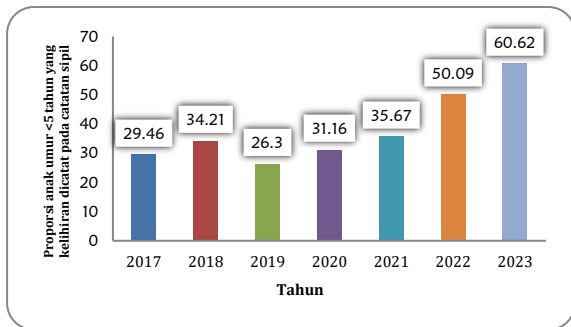
Tabel 7. Indikator 11.1.1.(A) Provinsi NTT Tahun 2015-2023

Tahun	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (%)
(1)	(2)
2015	56,4
2016	59,67
2017	66,25
2018	72,06
2019	32,08
2020	36,34
2021	40,41
2022	41,8
2023	42,7

Sumber: Susenas, BPS

Indikator 16.9.1 Proporsi Anak Umur di Bawah 5 tahun yang Kelahirannya Dicatat oleh Lembaga Pencatatan Sipil Menurut Umur merupakan salah satu indikator prioritas pada Tujuan 16 TPB/*SDGs*, Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh. Berdasarkan gambar 7, indikator ini mengalami proporsi terendah pada tahun 2019 sebesar 26,3% dan proporsi tertinggi pada tahun 2023 sebesar 60,62% di Kabupaten Manggarai. Oleh karena itu dapat dikatakan progres capaian sudah cukup baik ditunjukkan oleh tren yang meningkat 5 tahun terakhir. Namun, dibandingkan dengan target TPB/*SDGs*, maka masih sangat

diperlukan intervensi untuk mencatat kelahiran anak umur di bawah 5 tahun sehingga target sebesar 100% akan tercapai.



Gambar 7. Proporsi Anak Umur di Bawah 5 Tahun yang Kelahirannya Dicatat oleh Lembaga Pencatatan Sipil Menurut Umur di Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2023

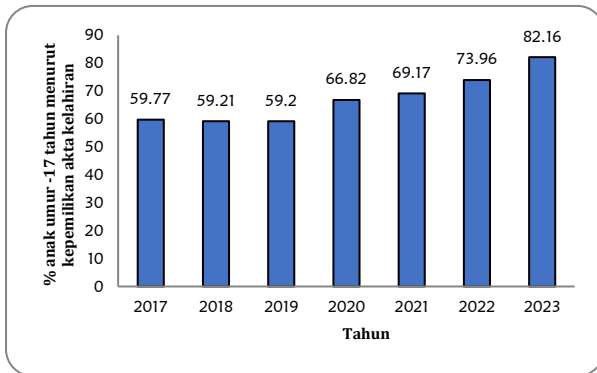
Indikator 16.9.1.(a) Persentase Kepemilikan Akta Lahir untuk Penduduk 40% Berpendapatan Bawah juga merupakan indikator prioritas Tujuan 16 TPB/*SDGs*. Berdasarkan tabel 8 di bawah ini, kondisi Provinsi NTT pada indikator ini adalah sebesar 66,78% pada tahun 2023 yang merupakan capaian terbesar sejak tahun 2015. Meskipun begitu, kondisi ini masih cukup jauh dari target TPB/*SDGs* sebesar 100% sehingga harus ada intervensi yang lebih intens untuk mencakup penduduk yang berpendapatan bawah agar bisa memiliki akte kelahirannya. Hal ini penting karena capaian tahun 2023 masih berada di 66,78% dan melihat progress peningkatan yang hanya naik 4% hingga 8% saja.

Tabel 8. Indikator 16.9.1.(A) Provinsi NTT Tahun 2015-2023

Tahun	Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun menurut Kepemilikan Akta Lahir untuk Penduduk 40% berpendapatan bawah (%)
(1)	(2)
2015	40,98
2016	41,69
2017	43,87
2018	47,84
2019	51,26
2020	53,46
2021	56,09
2022	62,22
2023	66,78

Sumber: Susenas, BPS

Indikator 16.9.1.(b) Persentase Anak Berumur 0 - 17 Tahun Menurut Kepemilikan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil merupakan indikator prioritas terakhir dari Susenas yang dianalisis di Tujuan 16 TPB/*SDGs*. Berdasarkan grafik di bawah ini, kondisi Kabupaten Manggarai pada indikator ini sebesar 82,16% pada tahun 2023. Namun masih cukup jauh pencapaian pada indikator ini dari target TPB/*SDGs* 100%. Selain itu progres kenaikan per tahunnya masih cukup rendah sekitar 5% hingga 6% saja. Sehingga intervensi harus dilakukan lebih intens oleh Pemerintah Daerah untuk bisa setiap penduduk Kabupaten Manggarai usia 0 sampai dengan 17 tahun memiliki akta kelahirannya.



Gambar 8. Persentase Anak Berumur 0 - 17 Tahun Menurut Kepemilikan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Manggarai, 2017-2023

#### 4. Simpulan dan Saran

Tata kelola data harus menjadi perhatian bersama dalam urusan data pemerintah mulai dari level tertinggi sampai dengan level terkecil, istimewa pada tata kelola data indikator TPB/*SDGs*. Peran setiap K/L D/I yang sudah diatur dalam Perpres Satu Data mesti harus dijalankan untuk membangun Sistem Statistik Nasional yang baik. Tata kelola data yang baik akan membuat evaluasi dan perencanaan akan tepat sasaran, efektif, dan efisien.

Berdasarkan gambaran deskriptif indikator prioritas dan indikator TPB/*SDGs* lain yang dianalisis dan bersumber dari Susenas, secara umum perkembangan indikator TPB/*SDGs* mengalami tren positif menuju tercapainya target yang ditetapkan. Berdasarkan tabel 9 di atas diketahui capaian tahun terakhir dari 8 indikator level Kabupaten Manggarai, 3 indikator di atas 95%, 3 indikator berada pada

80–84%, dan 2 indikator di bawah 65%. Sementara capaian tahun terakhir 5 indikator level Provinsi NTT menunjukkan 3 indikator di atas 85%, dan 2 indikator lainnya pada 45-67%. Kemudian 2 indikator level Indonesia berada di atas 98%. Melihat capaian di Kabupaten Manggarai yang dapat dikatakan sudah berada pada jalur yang tepat, maka optimis target tahun 2030 bisa dicapai dengan baik, tentunya dengan intervensi yang tepat sasaran oleh Pemerintah.

Tabel 9. Capaian Tahun Terakhir Indikator Prioritas pada Peta Jalan TPB/*SDGs* 2023 - 2030 yang Bersumber dari Susenas, BPS

Urutan Indikator	Besaran Target	Satuan Target	Level Ketersediaan Data	Capaian di Tahun Akhir	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.2.1	3.83	%	Manggarai	19.69	83.51
2.1.2	3.3	%	Indonesia	4.85	98.40
3.1.2.(a)	100	%	Manggarai	100	100
3.1.2.(b)	100	%	Manggarai	95.47	95.47
4.1.2.(a)	99.2	%	NTT	93.41	94.16
4.1.2.(b)	96.68	%	NTT	82.48	85.31
5.3.1.(a)	0.44	%	Indonesia	0.5	99.94
5.3.1.(b)	5.93	%	NTT	4.97	100
6.1.1	100	%	Manggarai	95.91	95.91
6.2.1.(b)	100	%	Manggarai	62.76	62.76
10.1.1	0.363	-	Manggarai	0.291	80.17
11.1.1.(a)	90.6	%	NTT	42.7	47.13
16.9.1	100	%	Manggarai	60.62	60.62
16.9.1.(a)	100	%	NTT	66.78	66.78
16.9.1.(b)	100	%	Manggarai	82.16	82.16

Sumber : Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2023 – 2030.

Saran yang dapat diberikan kepada pemerintah agar tata kelola data

indikator TPB/*SDGs* pada tingkat Kabupaten/Kota haruslah lebih dapat memenuhi kriteria data yang baik, seperti mudah diakses dan mudah ditafsirkan. Manfaatkan media yang sudah ada dan ditingkatkan seperti penyusunan *dashboard* ataupun publikasi yang mumpuni dan memadai. Tidak kalah penting yaitu sosialisasi dalam membangun kesadaran para pemangku kepentingan, praktisi, akademisi, dan masyarakat pada umumnya untuk secara bersama-sama mencapai seluruh tujuan TPB/*SDGs*, mengingat sisa kurang dari 7 tahun dari target yang disepakati dunia, khususnya di wilayah Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT.

#### Daftar Pustaka

- Ahyar, Hardani et al. 2020. Metode penelitian kualitatif & kuantitatif.
- Ambhita Sukma, Y.A., Indrawati, N., Zulfikar Ruslam, R. (2020). Analisis penerapan tata kelola data berdasarkan standar: studi kasus pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, PPIS 2020, 217-224. <https://ppis.bsn.go.id/index.php/download/2020/25>
- Bappenas. (2024). *Dashboard SDGs Indonesia*. <https://sdgs.bappenas.go.id/dashboard/> - diakses Mei 2024.
- Bappenas. (2023). Laporan pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan 2023.
- Bappenas. (2023). Peta jalan tujuan pembangunan berkelanjutan 2023 – 2030.
- BPS. (2022). Buku pedoman susenas kepala provinsi, statistisi madya/ koordinator fungsi statistik sosial bps provinsi, dan kepala bps kabupaten kota 2022.
- BPS. (2024). Gini rasio kabupaten Manggarai. <https://manggaraikab.bps.go.id/indicator/23/212/1/gini-rasio-kabupaten-manggarai.html> - diakses mei 2024.
- BPS. (2021). Indikator tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2021.
- BPS. (2023). Indikator tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia 2023.
- BPS. (2019). Peraturan badan pusat statistik nomor 4 tahun 2019 tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan statistik sektoral oleh pemerintah daerah 2019.
- BPS. (2024). Persentase anak berumur 0 - 4 tahun menurut kepemilikan akte kelahiran dari kantor catatan sipil. <https://ntt.bps.go.id/indicator/12/1065/1/persentase-anak-berumur-0---4-tahun-menurut-kepemilikan-akte-kelahiran-dari-kantor-catatan-sipil.html> - diakses mei 2024.
- BPS. (2024). Persentase anak berumur 0 - 17 tahun menurut kepemilikan akte kelahiran dari kantor catatan sipil. <https://ntt.bps.go.id/indicator/12/1063/1/persentase-anak-berumur-0---17-tahun-menurut-kepemilikan-akte->

- [kelahiran-dari-kantor-catatan-sipil.html](#) - diakses mei 2024.
- BPS. (2024). Persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota. <https://ntt.bps.go.id/indicator/23/584/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html> - diakses mei 2024.
- BPS. (2024). Persentase penduduk usia 0-17 tahun dengan kepemilikan akta lahir (40% terbawah), menurut provinsi. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTU3MCMMy/persentase-penduduk-usia-0-17-tahun-dengan-kepemilikan-akta-lahir--40-persen-terbawah---menurut-provinsi--persen-.html> - diakses Mei 2024.
- BPS. (2024). Persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah melahirkan menurut tempat melahirkan anak hidup yang terakhir. <https://ntt.bps.go.id/indicator/30/1367/1/persentase-perempuan-berumur-15-49-tahun-yang-pernah-melahirkan-menurut-tempat-melahirkan-anak-hidup-yang-terakhir.html> - diakses Mei 2024.
- BPS. (2024). Persentase perempuan ntt usia 15-49 tahun yang pernah melahirkan dalam 2 tahun terakhir dengan penolong persalinan terakhir tenaga medis. <https://ntt.bps.go.id/indicator/30/612/1/persentase-perempuan-ntt-usia-15-49-tahun-yang-pernah-melahirkan-dalam-2-tahun-terakhir-dengan-penolong-persalinan-terakhir-tenaga-medis.html> - diakses mei 2024.
- BPS. (2024). Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak. <https://ntt.bps.go.id/indicator/29/1527/1/persentase-rumah-tangga-dengan-akses-sanitasi-layak.html> - diakses mei 2024.
- BPS. (2024). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau menurut provinsi. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTIOMSMMy/persentase-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-hunian-yang-layak-dan-terjangkau-menurut-provinsi.html> - diakses mei 2024
- BPS. (2024). Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun (persen). <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM1OCMy/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-15-tahun--persen-.html> - diakses mei 2024.
- BPS. (2024). Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun menurut provinsi (persen). <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMMy/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18->

- [tahun-menurut-provinsi--persen-.html](#) - diakses Mei 2024.
- BPS. (2015). Statistik kesejahteraan rakyat provinsi Nusa Tenggara Timur 2015.
- BPS. (2016). Statistik kesejahteraan rakyat provinsi Nusa Tenggara Timur 2016.
- BPS. (2017). Statistik kesejahteraan rakyat provinsi Nusa Tenggara Timur 2017.
- BPS. (2018). Statistik kesejahteraan rakyat provinsi Nusa Tenggara Timur 2018.
- BPS. (2019). Statistik kesejahteraan rakyat provinsi Nusa Tenggara Timur 2019.
- BPS. (2020). Statistik kesejahteraan rakyat provinsi Nusa Tenggara Timur 2020.
- BPS. (2021). Statistik kesejahteraan rakyat provinsi Nusa Tenggara Timur 2021.
- BPS. (2022). Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur 2022.
- BPS. (2023). Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur 2023.
- BPS. (2024). Tingkat penyelesaian pendidikan menurut jenjang pendidikan dan provinsi. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk4MCMY/tingkat-penyelesaian-pendidikan-menurut-jenjang-pendidikan-dan-provinsi.html> - diakses mei 2024.
- Hidayat, Asep. (2022). - Implementasi Pembangunan *Sustainable Development Goals (Sdgs)* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. JURNAL PAPATUNG: Vol. 5 No. 2 Tahun 2022, 55-62. <https://www.ejournal.goacademica.com/index.php/japp/article/view/624>
- Pemerintah Republik Indonesia (2019). Peraturan presiden nomor 39 tahun 2019 tentang satu data indonesia.
- UNICEF. (2024). *GOAL 3: Good health and well-being ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages.* <https://data.unicef.org/sdgs/goal-3-good-health-wellbeing/> - diakses juni 2024.